

**PERAN INTELEKTUAL MUSLIM
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
MENUJU MASYARAKAT MADANI
(Sebuah Gagasan dan Harapan)**

Oleh:

DR. A. R. IDHAM KHOLID. M.Ag. ^{*)}

Kholididham17@yahoo.com

Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)
dan Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

ABSTRAK

Secara historis, aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah SAW., walaupun hanya satu ayat. Terkait dengan persoalan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat Madani ternyata disamping menjadi tugas para ulama pun menjadi tugas para intelektual Muslim. Peran intelektual Muslim dalam pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat madani mulai terlihat bentuknya secara jelas pada masa rezim Soeharto dan terus menemukan bentuknya pasca runtuhnya kekuasaan rezim Soeharto dan beralih ke masa Reformasi.

Kata Kunci: Cendikiawan Muslim, Pemberdayaan, dan Masyarakat Madani.

ABSTRACT

Historically, da'wah activity was originally only a simple task, namely the obligation to convey what is received from Rasulullah SAW, although only one verse. Related to the problem of community empowerment to the society Madani was in addition to the duties of the scholars became the duty of Muslim intellectuals.

The role of Muslim intellectuals in the empowerment of civil society towards civil society began to be seen clearly in the Soeharto regime and continues to find its form after the collapse of Soeharto regime power and move to the Reformation.

Keywords: Muslim Scholars, Empowerment, and Civil Society

A. INTELEKTUAL MUSLIM

1. Makna Intelektual Muslim

Merumuskan Peran Intelektual Muslim di Tengah Perubahan zaman yang semakin modern terutama terkait perennya dalam memberdayakan masyarakat menuju masyarakat yang madani tentu merupakan hal yang penting.

Terkait dengan masalah perubahan, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran (Q. S. 13:11). Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan,¹ yang ada pada diri*

*) Penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Prodi Filsafat Islam dan

*mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*²

Pada esensinya, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Karena itu, para filsuf menyebut perubahan sebagai hakikat dari segala sesuatu. Walaupun demikian, perubahan tidak selalu linear dengan harapan kita. Perubahan memiliki akibat ganda, yaitu positif dan negatif. Dalam konteks ini, firman Allah tersebut menemukan signifikansinya.

Proses perubahan bisa terjadi jika ada kontingensi antara peran manusia dengan rencana Tuhan (takdir) karena perubahan tidak selalu sesuai keinginan kita sehingga penting menemukan aktor yang akan mengarahkan perubahan pada arus yang positif.

Aktor perubahan yang diisyaratkan dalam Al-Quran adalah *qaum* bermakna masyarakat. Secara teoretis, dalam kajian sosiologi makna *qaum* sepadan dengan masyarakat (*society*). Dengan demikian, aktor yang dimaksud dalam surat *Ar-Ra'd* ayat 13 adalah aktor kolektif atau masyarakat,

Masyarakat adalah kumpulan dari individu yang terorganisasi, memiliki pranata, aturan dan norma. Gagasan ini senada dengan pesan-pesan dalam sebuah riwayat bahwa

"Kebenaran yang tidak terorganisasi akan kalah dengan kejahatan yang terorganisasi."

Dalam sistem sosial, ada dua hal yang menopang

berlangsungnya sebuah masyarakat, yaitu *role* (peran) dan *actor* (pelaku).³ Setiap individu dalam masyarakat berada dalam bingkai tersebut. Kesenambungan masyarakat akan sangat bergantung pada sejauh mana individu dapat memenuhi kedua elemen sistem sosial tersebut. Demikian pula, jika mengeksplorasi peran sarjana muslim dalam proses perubahan sosial.

1. Intelektual Muslim sebagai *Agent of Change*

Sosok sarjana sebagai intelektual sudah sejak lama menjadi wacana. Kajian-kajian ini telah menghasilkan beberapa macam definisi tentang hakikat, peranan serta kepentingan cendekiawan (sarjana). Dalam definisi Lewis Coser cendekiawan adalah orang-orang yang terlihat tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas. Edward Shils membuat gambaran yang sama dengan Coser, kaum cendekiawan adalah orang-orang yang mencari "kebenaran" mencari prinsip-prinsip yang terkandung dalam kejadian-kejadian serta tindakan-tindakan diri dalam hubungannya dengan masyarakat.⁴

Dalam khazanah agama, baik di Barat maupun Timur, peran cendekiawan identik dengan sosok nabi, rahib, atau resi. Motif mereka adalah

Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

¹ Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

² (Q. S. 13:11).

³ Don Martindale, *The Nature and Types of Sociological Theory*, Boston: The Riverside Press, 1960, hlm. 470-471.

⁴ Arief Budiman, *Peranan Mahasiswa sebagai bilelegensia*, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 143.

kegairahan untuk berbakti pada kebenaran. Cendekiawan keagamaan tidak mempunyai kepentingan duniawi, tidak boleh menarik keuntungan sosial atau politik.⁵

Jika cendekiawan sudah terjun ke dalam kancah kepentingan sesaat (*vested interest*), ia diragukan bahkan Harry J. Benda menuduhnya sebagai bentuk pengkhianatan kaum intelektual.

Di Indonesia, relasi intelektual pernah bergulir pada periode pasca-kemerdekaan (1958-1966). Kala itu, Bung Hatta tampil sebagai pengecam utama gagasan Demokrasi Terpimpin (1958-1966) yang diusung oleh Presiden Soekarno. Dengan mengutip *La Trahsion des Clercs* (pengkhianatan kaum intelektual), buah karya intelektual Prancis Julien Benda, Hatta mengecam dan mengingatkan tugas kaum intelektual.

Lain Hatta, lain pula Soedjatmoko. Bagi eksponen 45 ini, cendekiawan adalah seorang resi atau nabi. Dalam tulisannya "*Peranan Intelektual di Negara sedang Berkembang*", ia berpendapat, bahwa bukan hanya mayoritas kaum intelektual harus berada di luar pemerintahan, tetapi juga pengaruh mereka akan efisien bila disampaikan secara anonim.

Anjuran berbeda terhadap kaum intelektual datang dari Dorodjatun Kuntjoro Jakti (1984). Para cendekiawan harus berdiri sebagai *man of action*, aktif dan berpartisipasi. Dalam zaman yang riuh ini,

bangsa tidak hanya membutuhkan ide dan wacana. Kita lebih membutuhkan tindakan, seperti tokoh dalam drama *Faust* yang berucap, "Pada mulanya adalah perbuatan." Para pemikir kiranya dalam situasi tertentu, justru didesak untuk menjadi *man of action* tanpa harus kehilangan kebenarannya dalam membaca realitas.

2. Sejarah Intelektual Muslim Indonesia

Dalam konteks sarjana muslim di Indonesia, kompleksitas tersebut dapat kita runut sejak sejarah intelektual muslim Indonesia sejak abad ke-19. Meskipun Indonesia masih berada dalam masa kolonialisme, banyak warga muslim mendapatkan pendidikan secara baik. Buah dari pendidikan ini melahirkan kesadaran di kalangan sarjana muslim secara eksklusif untuk menciptakan ruang aktualisasi publik di tengah masyarakat dan negara termasuk aktivitas politik. Pada periode abad ke-20 peran sarjana dan intelektual muslim semakin mengemuka dan meluas ke wilayah publik.

Situasi ini memaksa para sarjana dan intelektual muslim dalam pergulatan yang mengarah pada pencarian identitas peran yang berhadapan dengan negara (otoritas kekuasaan). Keterlibatan para cerdas pandai dalam politik mengkristal dalam bentuk partai politik. Akan tetapi, meski didukung kredibilitas intelektual dan posisi kekuasaan politik memadai, partisipasi partai politik intelektual muslim tak kunjung memperoleh suara mayoritas. Situasi ini tak urung membuat sebagian cendekiawan merasa khawatir terhadap peran struktural yang dipilih.

⁵ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama : Potret Agama dalam Dinamika Konflik Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 193

Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat catatan gemilang kiprah intelektual muslim yang menjadi pelaku utama sejarah. Beberapa organisasi seperti *kaoem moeda Islam* dan *kaoem mardika*, muncul sekitar tahun 1910-an telah memberi kontribusi dalam perluasan aktivitas publik yang menjangkau konstituen lebih luas. Situasi ini berlanjut pada akhir 1920-an dengan peran intelektual organik muslim yang mulai beralih pada peran-peran sebagai pendidik publik.⁶

Pada zaman kemerdekaan (*nations building period*) sarjana dan pelajar muslim mengembangkan kiprah mereka dalam proses islamisasi kaum terpelajar. Upaya itu terwujud dalam komunitas Jong Islaminten Bond (JIB) dan Studenten Islam Studieclub (SIS).

Pasca-kemerdekaan, meski kalah, sarjana muslim tetap bisa tampil sebagai elite politik yang dominan. Antara tahun 1950-1954, mereka menolak gagasan pendirian negara Islam sekaligus menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahun 1960-an, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Islam Indonesia (PII) memainkan peran besar dalam demonstrasi menjatuhkan rezim Soekarno. Dominasi keduanya menandai signifikansi pertama inteligensia muslim Indonesia pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, gelanggang yang mereka harapkan masih jauh dari harapan. Terutama karena proses peralihan rezim dari Soekarno ke Soeharto, membawa

konsekuensi serius pada gerak kaum akademis muslim.⁷

Rezim Soeharto di bawah payung Orde Baru, meski diwarnai peristiwa-peristiwa pemasung partisipasi publik dalam ranah politik, tidak sepenuhnya memandulkannya kaum sarjana dan akademisi muslim dalam dunia politik. Situasi ini memunculkan corak baru gerakan kaum terpelajar muslim di gerakan dakwah dan masjid kampus. Periode tahun 70-an di tengah kekangan negara, para sarjana dan cendekiawan muslim mencari formulasi baru dalam mengekspresikan Islam. Hasilnya adalah para eksponen seperti Nurcholish Majid, Imadudin Abdurrahim, dan Djohan Efendi. Meskipun tidak seiring sejalan dalam praktiknya, mereka dipertemukan dalam sebuah agenda bersama, yakni mendukung rumbuhnya kebudayaan yang demokratis, sehat dan *civil society*.⁸

Gerakan dakwah masjid yang diprakarsai mahasiswa dan pelajar muslim telah memberi warna berupa islamisasi komunitas akademis-sekuler. Di berbagai kampus dijumpai komunitas-komunitas yang berbasiskan dan beridentitaskan agama.

Setelah pergantian rezim berkali-kali, telah memunculkan model peran sarjana muslim seperti yang dipelopori oleh komunitas-komunitas yang semula berbasis di masjid kampus seperti *Harakah*. Di antara yang paling berpengaruh, kita bisa menyebut Kesatuan Aksi Mahasiswa

⁷ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama : Potret Agama dalam Dinamika Konflik Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 195

⁸ Nurcholish Madjid melahirkan banyak gagasan yang diluarkannya dalam berbagai tulisan. Kumusannya tentang peran dan kiprah umat Islam terungkap dalam salah satu karyanya, *Islam Doktrin dan Peradaban*.

⁶ Johan Effendi, *Pergerakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES, 1993.

Muslim Indonesia (KAMMI) dan partai politiknya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meskipun demikian, generasi baru aktivis organisasi keagamaan yang mapan mulai mengalami liberalisasi pemikiran sebagai akibat interaksi dengan perkembangan global yang semakin deras.

Apa signifikansi kita menyoal peran sarjana muslim di tengah perubahan dewasa ini? . Dadang Kahmad dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Agama : Potret Agama dalam Dinamika Konflik Pluralisme dan Modernitas*. Menjelaskan signifikansi kita menyoal peran sarjana muslim di tengah perubahan dewasa ini. Menurut pendapatnya:

Pertama, sebab aktual antara lain fenomena merebaknya gerakan-gerakan Islam kontemporer dalam berbagai ekspresi, semakin menguatnya animo masyarakat terhadap kiprah sarjana muslim di bidang-bidang yang lebih luas, kemudian situasi ini semakin diperuncing oleh efek-efek dari hubungan global antara umat Islam dan negara Barat yang segera direspons.

Kedua, sebab fundamental. Hal ini berkaitan dengan semakin besarnya pengaruh kaum sarjana muslim dalam proses perubahan sosial-budaya. Dalam konteks itu, mereka berperan karena:

- a. sarjana muslim dan kaum cendekiawan pada umumnya merupakan pelopor dan inovator;
- b. mereka memiliki kapasitas intelektual dan pola pikir memadai untuk membawa masyarakat pada kemajuan;
- c. mereka memiliki karakter responsif, ekspresif, dan formatif;

- d. kaum terdidik seperti sarjana muslim lebih kreatif bukan reaktif, dan independen;
- e. sarjana muslim seharusnya jujur dan berani (*intellectual courage*);
- f. sarjana muslim bisa mengemban peran sosial proetnik di tengah masyarakat.⁹

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. PEMBERDAYAAN

a. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pembangunan dan -terutama istilah pemberdayaan--sesungguhnya sejak tahun 1990-an telah menjadi *trend* dalam pembangunan. Kegagalan konsep pembangunan yang menekankan pada aspek makro, telah diyakini bahwa konsep pemberdayaan sebagai alternatif ampuh untuk penuntasan pembangunan. Pemerintah pusat di beberapa kementerian secara tegas membentuk berbagai lembaga pemberdayaan, bahkan ada kementerian yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan. Ada juga program nasional yang fokus pada pemberdayaan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNMP Mandiri).¹⁰ Begitu pula di tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk lembaga atau satuan kerja (Satker) yang menangani khusus tentang pemberdayaan masyarakat. Banyak pula pemerintah daerah yang langsung membentuk lembaga

⁹ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama : Potret Agama dalam Dinamika Konflik Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 192

¹⁰ Oos. M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta. 2014., hlm., 2. Lihat juga Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung Humaniora., 2013., glm., 1

dengan nama pemberdayaan, misalnya: Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapimas), atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pada tingkat desa atau kelurahan sudah dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan/berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.¹¹

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki

kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Terkait dengan pengertian pemberdayaan, penulis mencoba mengutip dari bukunya Edi Suharto yang berjudul *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*.¹² Dalam buku tersebut Suharto menjelaskan beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan¹³

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian ini, hingga lembaga yang mau memnuhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,

¹¹ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat, Op., cit.,* , 28.

¹² Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Ibid.,* 27.

¹³ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Ibid.,* 27.

dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et.al.*, 1994).

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Berdasarkan pengertian pemberdayaan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebuah proses dan ljuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk masya-rakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai ljuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keber-hasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

b. Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pem-berdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2004). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikailkan dengan empat dimensi kekuasaan. Yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*) 'kekuasaan atas' (*power over*), dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). Adapun indikator pemberdayaan adalah:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempal tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-

barangkebutuhan
keluargasehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barangtersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barangsekunderatau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barangtersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kreditusaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang

mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorangdianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.¹⁴

c. Strategi Pemberdayaan

Parsons *et.al.* (1994: 112-113) sebagaimana dikutip oleh Suharto, menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam

¹⁴ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Ibid.*, hlm., 27., hlm., 218-219

retasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumberatau sistem lain di luardirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.¹⁵

d. Pendekatan Pemberdayaan

Untuk pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas menurut pendapat Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat* dicapai dengan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P.¹⁶

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

¹⁵ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Ibid.*, hlm., 27., hlm., 218-219

¹⁶ 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan *Ibid.*,

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun teknik pemberdayaan yang dapat

dilakukan untuk mem-berdayakan masyarakat menurut Dubois dan Miley (1992:211) sebagaimana dikutip Suharto adalah ;

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan kragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat parti si pasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-Lantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.¹⁷

B. MASYARAKAT MADANI

1. Pengertian Masyarakat

¹⁷ Edi Suharto. *Pembangunan Kebijakan sosial dan Pekerjaan sosial; Spektrum Pemikiran* : Bandung ; Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS). 1996., hlm., 68

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan saling memengaruhi satu sama lain.¹⁸

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau *masyaraka* yang berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *society*, yang berasal dari kata lain *socius* berarti kawan.¹⁹

Kata *masyarakat* juga berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling memengaruhi, yang selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).²⁰

Dalam bahasa Inggris, kata *masyarakat* diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu *society* dan *community*. Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang berikut.²¹

a. Memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah wadah dan wilayah sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, perasaan sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang timbul atas akibat

pergaulan hidup atau hidup bersama manusia.

b. *Community* dipandang sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologi dan hubungan antarmanusia, di dalamnya ada yang sifatnya fungsional. Contohnya adalah masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa, dan sebagainya.

Dari kedua ciri khusus tersebut bahwa masyarakat yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, dapat disebut *masyarakat society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan *like interest*, hubungan menjadi bersifat pamrih, dan ekonomis.²²

J.L Gillin dan J.P. Gillin menyatakan bahwa masyarakat adalah ke-lompok manusia yang terbesar mempunyai tradisi, kebiasaan, sikap, "dan perasaan persatuan yang sama. Dalam hal ini, masyarakat meliputi pengelompokan-pengelompokan kecil."²³

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab "*syarikah*" yang berarti perkumpulan.²⁴ Istilah masyarakat yang berasal dari kata *syarikah* tersebut lebih dikenal dan begitu familiar bagi masyarakat Indonesia dibandingkan istilah Arab *al-mujtama'* yang berarti masyarakat.

Kata masyarakat menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pergaulan hidup manusia (himpunan orang yang

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 146.

¹⁹ *Loc. Cit.* Abdulsyani, hlm. 30.

²⁰ *Loc. Cit.* H. Hartono dan Arnicun Aziz, hlm.

²¹ *Loc. Cit.* H. Hartono dan Arnicun Aziz, hlm.

²² *Op. Of.*, him. 31.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 1

hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu).²⁵

Ralph Linton yang dikutip oleh Sidi Gazalba, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah masyarakat adalah kelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu.²⁶

Sedangkan masyarakat menurut Murtadha Muthahhari adalah kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus dan hukum-hukum khas yang hidup bersama.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang digunakan untuk menggambarkan ikatan atau interaksi antara pihak-pihak yang bersahabat. Dalam arti asosiasi, sebuah masyarakat adalah tubuh individu digariskan oleh batas-batas saling ketergantungan fungsional, terdiri dari karakteristik seperti identitas nasional atau budaya, solidaritas sosial, bahasa atau organisasi hierarkis. Lebih luasnya, masyarakat merupakan infrastruktur ekonomi, sosial, atau industri, terdiri dari kumpulan individu bervariasi.

2. Pengertian Masyarakat Madani

Gagasan agama madani diilhami oleh konsepsi *civil religion* yang untuk pertama

kalinya dipopulerkan oleh Robert N. Bellah, seorang pensiunan Guru Besar Sosiologi pada Universitas {California, Berkeley, Amerika Serikat. Ia memfokuskan penelitiannya pada agama di Amerika, yang kemudian mendapat penghargaan "Sorokin Award" dari American Sociological Association pada tahun 1976 untuk karyanya *The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial*.

Menurut pengakuannya, gagasan *civil religion* untuk pertama kali diintrodusir oleh J. Rousseau dalam karyanya, *The Social Contract*. Dalam karyanya tersebut, seperti dikutip Bellah, Rousseau membuat garis besar tentang dogma-dogma *civil religion* yang sederhana yaitu eksistensi Tuhan, kehidupan yang akan datang, pahala bagi kebajikan dan hukuman bagi yang sebaliknya, serta penyingkiran sikap keagamaan yang tidak toleran. Lebih lanjut Bellah mengemukakan bahwa ide tentang *civil religion* bukan hanya milik Rousseau, tetapi telah menjadi bagian dari iklim budaya akhir abad ke-18. Bellah misalnya, mengutip Benjamin Franklin yang menulis dalam otobiografinya bahwa eksistensi Tuhan yang menciptakan dunia dan mengatur dengan kebijaksanaan-Nya adalah tidak diragukan lagi. Demikian pula, bahwa pelayanan yang disukai oleh Tuhan adalah berbuat baik kepada manusia; jiwa bersifat abadi; semua kejahatan akan memperoleh hukuman dan kebajikan akan memperoleh pahala, baik di dunia atau di akhirat, merupakan esensi setiap agama.

Dengan mendasarkan pada penelitiannya, Bellah memberikan hipotesis akan adanya alasan yang kuat untuk memercayai bahwa

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1991., hlm., 636.

²⁶ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam., op., cit.*, hlm. 5.

²⁷ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 15.

agama, khususnya ide tentang Tuhan, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk alam pikiran para negarawan Amerika yang awal. Menurutnya, hal tersebut sebagaimana dapat dibaca dalam teks pidato pelantikan Presiden John R Kenedy pada 20 Januari 1961 yang memberikan tiga acuan sebagai simbol *civil religion* yaitu: pertama, sumpah kepresidenan yang ia nyatakan: "...*karena saya telah menyatakan sumpah di hadapan Anda sekalian dan Tuhan Yang Mahakuasa, sumpah yang sebenar-benarnya yang sama dengan yang dituliskan oleh leluhur kita, satu dan tiga perempat abad yang lalu.*" Kedua, pernyataannya: "...*keyakinan bahwa hak-hak manusia tidak datang dari pemberian negara, tetapi dari tangan Tuhan.*" Ketiga, pernyataan dari bagian pidato penutupnya yang menyatakan: "...*tetapi dengan menyadari sepenuhnya bahwa di bumi ini, karya Tuhan hams benar-benar menjadi karya kita.*"²⁸

Kecenderungan pengaruh agama dalam membentuk alam pikiran para negarawan Amerika yang awal, juga dapat dibaca dalam dokumen-dokumen kenegaraan seperti pidato pelantikan pertama Washington, pada 30 April 1789, pidato pelantikan Presiden Johnson, pidato pelantikan Abraham Lincoln, dan sebagainya. Dokumen penting lainnya, menurut Bellah adalah dokumen deklarasi kemerdekaan yang memuat empat acuan kepada Tuhan yaitu: pertama, berbicara tentang "hukum alam dan Tuhan Penguasa Alam (*Laws of Nature*

and Nature's God); kedua, pernyataan bahwa "oleh Sang Pencipta, dianugerahi hak-hak tertentu yang tak dapat dicabut; ketiga, "Hakim Agung dunia atas niat luhur kita"; dan keempat, yang mengindikasikan "suatu kepercayaan yang teguh terhadap Tuhan Yang Maha-bijaksana." Semangat ketuhanan yang kuat inilah, dilembagakan dalam semboyan negara "kepada Tuhan kita percaya" (*in God we trust*).

Konsepsi ketuhanan dalam *civil religion* dapat diterima oleh semua orang Amerika sebagai suatu konsep agama yang melampaui agama (*beyond belief*). Setiap kelompok agama disatukan secara politis, tetapi dengan tetap mempertahankan kebhinnekaan secara kultural dan keagamaannya.

Apabila melakukan kontekstualisasi konsepsi *civil religion* di Indonesia, gagasan serupa dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen resmi kenegaraan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Dalam hampir setiap pidato kenegaraan, Presiden Republik Indonesia selalu memulainya dengan ungkapan "atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang"

(*bismillahirrahmanirrahim*) atau atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Konsepsi ketuhanan ini, secara tegas dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidatonya yang terkenal "*To Build the World Anew*" di hadapan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960. Filsafat hidup Ketuhanan Yang Maha Esa ini, kemudian menjadi manifesto politik sebagaimana tercantum dalam UUD pasal 29 ayat 1 bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Demikian pula, dengan pembukaan UUD 1945 yang

²⁸ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama : Potret Agama dalam Dinamika Konflik Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: Pustaka Setia, 2011., hlm., 187-188

diawali dengan pernyataan "atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa", menunjukkan bahwa konsepsi ketuhanan telah menjadi *character building* (watak) bangsa Indonesia. Konsepsi ketuhanan Yang Maha Esa inilah, yang saya sebut dengan agama madani, yaitu suatu konsepsi ketuhanan yang menjadi titik temu agama-agama, suatu "agama yang melampaui agama", kelompok-kelompok agama disatukan secara politis, sekaligus dengan mempertahankan kebhinekaan secara kultural dan keagamaannya.⁷

Konsepsi agama madani mengandaikan adanya lima substansi isi keagamaan yang bersifat universal, yaitu adanya orientasi hidup transendental yang meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi; ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan; kesadaran akan tanggung jawab bersama; pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri pribadi; kebebasan dan toleransi beragama.

Sikap keagamaan yang meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi menjadi substansi agama madani di Indonesia, sebagaimana dipraktikkan dalam setiap pengangkatan dan pengucapan sumpah jabatan politis dengan ungkapan "Demi Allah". Oleh karena itu, kewajiban pejabat yang telah

Secara teologis maupun sosiologis, penyatuan berbagai kelompok keagamaan dalam satu konsepsi agama madani menjadi sangat mungkin, karena pesan ketuhanan secara esensial sama (*The essential unity of all religions*). menyatakan sumpahnya adalah melampaui konstitusi, tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan.

Sebagaimana juga dalam konsepsi politiknya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi secara implisit dan bahkan eksplisit, kedaulatan tertinggi dinisbatkan kepada Tuhan. Tidak heran jika ada ungkapan semacam adagium bahwa "suara rakyat adalah suara Tuhan". Makna adagium ini adalah kehendak rakyat yang diekspresikan dalam suara mayoritas menjadi sumber pelaksanaan otoritas politik, tetapi tanpa penisbatan kepada Tuhan (otoritas paling tinggi), kehendak rakyat akan kehilangan signifikansinya.²⁹

Dalam konteks pluralitas agama, orientasi transendental dengan meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi sehingga segala bentuk absolutisme politik atau agama tertentu, sekalipun mayoritas, tidak dapat diterima. Semua agama harus tunduk pada konsepsi ketuhanan universal (yang melampaui agama), dan dalam konsepsi ketuhanan ini pula, agama mendapatkan titik temu, tanpa harus meleburkan dalam satu agama.

Konsep agama madani seyogianyalah dapat melahirkan suatu ikatan batin bersama dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran akan tanggung jawab dan lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selain itu, dapat melahirkan suatu sikap toleran dalam beragama dan kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan (agama), dengan tidak mengganggu keutuhan lingkungan dan kemanusiaan pemeluk agama lain. Dengan demikian, melalui agama madani kelompok agama

²⁹ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama : Potret Agama dalam Dinamika Konflik Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 189-190

akan dapat disatukan secara politis, sekaligus dipertaliankan kebhinekaannya, baik secara kultural maupun keagamaan. Demikian pula, konflik-konflik keagamaan akan sedapat mungkin diarahkan untuk proses dinamisasi dan akselerasi pembangunan di bawah otoritas ketuhanan universal yang menjadi titik temu dan kesepakatan bersama.

3. Agama Madani: *Universal Social Ethic*

Konsekuensi lain yang juga sangat signifikan dari kesadaran Ketuhanan Yang Maha Esa, pada kehidupan tingkat sosial adalah munculnya pola-pola hidup dalam standar perilaku moral yang tinggi berupa "tindakan-tindakan bermoral". Dalam semangat ketuhanan, hidup bermoral bukan lagi merupakan masalah kesediaan, melainkan sebuah keharusan, dan kelanjutan yang wajar dari fitrah kemanusiaan yang berketuhanan. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, gagasan agama madani lebih merupakan aktualisasi nilai-nilai *universal social ethic* dalam setiap tindakan kekayaan dan berkebudayaan.

Hal yang niscaya bahwa iman atau kesadaran ketuhanan akan selalu berdialog dengan realitas sosial yang plural karena hidup manusia tidak berlangsung dalam "suasana batin" yang tertutup, tetapi dalam proses dialog dengan lingkungannya. Dengan kata lain, manusia tidak dapat melepaskan kediriannya dari dialog dalam dialektika dinamika lingkungan dunia atau *k e b u*⁸ Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa dalam kerangka membangun kebudayaan yang sejalan dengan keimanan dan konsepsi ketuhanan, kerja sama inter dan antarumat beriman (beragama) dalam dialog

kehidupan (menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan), menjadi suatu keharusan.

Kerja sama ini dapat dilakukan melalui berbagai forum komunikasi atau perhimpunan agama yang memiliki kepedulian iman bersama dalam menjaga keutuhan lingkungan dan kemanusiaan. Dalam konteks inilah, agama madani sebagai universal *social ethic* seperti keadilan sosial, perdamaian dan pembebasan, dapat dijadikan dasar pijakan bagi kerja sama inter dan antarumat beragama. Melalui pijakan *universal social ethic*, seluruh kaum beriman (penganut agama), secara universal menemui tantangan kemanusiaan yang sama sehingga dapat tersentuh "religiusitasnya", untuk tidak hanya menonjolkan *having a religion*, tetapi juga *being a religion* sebagai suatu *promising and challenging*.³⁰

Dengan demikian, kerja sama antarumat beriman seyogianyalah dapat diikat dan diarahkan dalam gerakan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, dan pembebasan. Gerakan bersama ini pula, yang tampaknya akan menjadi tugas kemanusiaan yang berdimensi perennial.

D. PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat, menuju masyarakat yang madani, selain menjadi tugas para ulama, pun menjadi tugas para Intelektual Muslim. Realitas ini memberikan makna bahwa kehadiran ulama dan para intelektual muslim dalam berdakwah terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat menuju

³⁰ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama : Potret Agama dalam Dinamika Konflik Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 190-191.

masyarakat madani bagaimanapun sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Realitas yang demikian menunjukkan betapa urgennya sinergitas antara ulama dan intelektual muslim dalam memberdayakan masyarakat menuju masyarakat madani.

DAFTAR BACAAN

- A. Subandi dan Syukriadi Sambas, *Epistemologi Dakwah*. Bandung: KP Hadis. 1999.
- Aqib Suminta. *Kaderisasi Ulama di Pesantren*. Dalam Saifullah Ma'sum. *Dinamika Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat Ini)*. Depok: Yayasan Islam Al-Hamidiah dan Yayasan Saifudin Zuhri. 1998.
- Badruddin H. Subky. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zxmqn* Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Hamdan Rasyid. *Kaderisasi Ulama di Pesantren*. Dalam Saifullah Ma'sum. *Dinamika Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat Ini)*. Depok: Yayasan Islam Al-Hamidiah dan Yayasan Saifudin Zuhri. 1998.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1992.
- Moch. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media 2004.
- Ropingi el-Ishaq. *Pengantar Ilmu Dakwah. Studi Komprehensif dari Teori ke Praktek*. Malang: Madani.
- Saifullah Ma'sum. *Dinamika Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat Ini)*. Depok: Yayasan Islam Al-Hamidiah dan yayasan Saifudin Zuhri. 1998.